

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemilih pemula merupakan sasaran utama dari partai-partai politik yang mengikuti pemilu di Indonesia karena jumlahnya setengah jumlah keseluruhan pemilih serta orientasi politiknya belum ajeg, sehingga mudah dipengaruhi. Untuk mengatasi hal tersebut maka pemilih pemula memerlukan kecakapan partisipatoris politik yang memadai, karena apabila pemilih pemula tidak mempunyai kecakapan partisipatoris politik yang memadai maka menyebabkan rendahnya kualitas politik pemilih pemula, yang akan berdampak pada rendahnya kualitas pemilu. Padahal warga negara dan masyarakat yang demokratis harus memfokuskan pada pendidikan dan pembekalan akan kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dan bertanggung jawab, efektif, dan ilmiah (Winatapura dan Budimansyah, 2007:190).

Senada dengan pernyataan tersebut Khairon (1999:14) mengungkapkan sebagai berikut :

Di alam demokrasi sekarang ini warga negara tidak cukup mempunyai bangunan pengetahuan politik atau aspek-aspek politik, tetapi juga membutuhkan penguasaan terhadap kecakapan-kecakapan intelektual atau berpikir kritis, yakni : a) Kemampuan mendengar; b) Kemampuan mengidentifikasi dan mendeskripsikan persoalan; c) Kemampuan menganalisis; dan d) Kemampuan untuk melakukan suatu evaluasi isu-isu publik; Kecakapan Partisipatoris mencakup : a) Keahlian berinteraksi (*interacting*); b) Keahlian memantau (*monitoring*) isu publik, c Keahlian mempengaruhi kebijakan publik.

Pernyataan tersebut mengindikasikan perlu adanya penguasaan terhadap kecakapan partisipatoris politik warga negara agar dapat berpartisipasi dalam kehidupan kenegaraannya yang tidak hanya terbatas dalam proses pemberian suara. Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Pemilu 2009 diperkirakan sekitar 100 juta pemilih adalah pemilih yang berusia 20-40 tahun. Keberadaan pemilih pemula sering dikaitkan dengan keberhasilan suatu partai dimana jika suatu partai berhasil meraih simpati pemilih pemula, maka partai politiknya akan mendapatkan suara yang tinggi dalam pemilihan. Namun, sayangnya pemilih pemula di Indonesia belum berpartisipasi secara cerdas karena menurut data yang disajikan oleh : [//www.inn-world.net/berita_detail.php?id=1659](http://www.inn-world.net/berita_detail.php?id=1659), hasil survei terhadap 2.500 responden di lima kota besar menunjukkan pemilih pemula, baik yang pernah memilih pada Pemilu 1999 maupun yang pertama kali memilih pada Pemilu 2004, cenderung memilih partai-partai politik lama peserta Pemilu 1999 yang meraih kursi di parlemen dan memiliki nama cukup terkenal. Partai-partai kecil lama ataupun baru tidak banyak menarik minat dan tidak disebut-sebut responden. Alasan tidak menyebut atau memilih partai politik kecil, karena mereka cenderung merasa rendah diri jika memilih partai politik kecil. Dari hasil survei itu dapat ditarik benang merah bahwa pada Pemilu 2004 faktor dominan pilihan kelompok pemula terhadap parpol masih atas dasar ketokohan dan sentimen primordial. Tampak masih belum menjadi proses politik yang didasari oleh sebuah kesadaran yang rasional, sehingga pemilu hanya menghasilkan perputaran elite-elite politik yang tetap. Elite hanya berputar pada *power circle* yang ada di partai politik. Bahkan

yang paling memprihatinkan ialah sebagian besar pemilih pemula tidak menggunakan hak pilihnya, hal inilah dikhawatirkan terjadi pada Pemilu 2009 dikarenakan sosialisasi kepada pemilih pemula belum maksimal (DIPA BPNP, 2009:3). Situasi yang terjadi pada pemilih pemula tersebut apabila dibiarkan tentunya akan menghambat proses peningkatan kualitas demokrasi yang sedang dilaksanakan oleh negara Indonesia, karena bagaimanapun juga demokrasi memerlukan pemilih yang cerdas untuk berpartisipasi. Seperti yang dikemukakan oleh Huntington (1982 : 56) bahwa model demokrasi terbaik meliputi tiga tahap substansial, yakni tahap pertama perumusan dan pengembangan identitas nasional, tahap kedua pengembangan pranata atau kelembagaan politik yang efektif, dan tahap ketiga adalah partisipasi politik. Pemilih pemula harus didorong untuk dapat memposisikan dirinya sebagai pemilih yang memiliki kecakapan partisipatoris, karena bagaimanapun juga mereka merupakan generasi penerus bangsa yang akhirnya dapat menumbuhkan suatu budaya politik karena sikap politiknya. Seperti yang diungkapkan oleh Mannheim (dalam Seymour, 2007 : 174) : *“Pengalaman khusus dalam usia yang khusus menciptakan pemahaman politik yang sangat menentukan di dalam melihat pengalaman-pengalaman politik di masa yang akan datang”*. Dalam hal ini dibutuhkan pendidikan politik dalam rangka menyiapkan kecakapan partisipatoris pada pemilih pemula sehingga partisipasi yang mereka lakukan merupakan partisipasi aktif.

Dengan adanya pemilih pemula yang cakap, maka dapat mengubah kebiasaan partai politik, misalnya menolak mobilisasi massa yang selama ini masih menjadi kebiasaan parpol dalam berkampanye untuk menjaring massa,

pemberian uang dengan imbalan terlibat dalam politik, karena mereka memiliki hak pilih dan diikutsertakan sebagai pemilih. Dapat dikatakan bahwa pemilih pemula dapat memberikan pendidikan politik bagi parpol. Hal ini sejalan dengan pendapat Mansbridge dalam *Participation and Democratic Theory* (CICED,2002:147) dikatakan bahwa “...*the major function of participation in theory of participatory democracy is...an educative one, educative in a very widest sense*”., yakni bahwa fungsi utama dari partisipasi dalam pandangan teori demokrasi partisipatif adalah bersifat edukatif dalam arti yang sangat luas. Hal itu dinilai sangat penting karena dalam partisipasi demokrasi akan mampu mengembangkan kepribadian yang demokratis. Untuk mendukung partisipasi pemilih pemula maka diperlukan suatu pembekalan kecakapan partisipatoris yang dapat dilakukan, baik dari jalur formal maupun informal. Dari jalur informal dapat dilakukan oleh partai politik, organisasi kepemudaan, serta media massa. Dari jalur formal ialah melalui pendidikan di persekolahan terutama melalui Pendidikan Kewarganegaraan, karena didalam pendidikan kewarganegaraan memiliki fungsi formal sebagai pendidikan umum (*general education*) dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No.20 Tahun 2003, serta pijakan utama konsep-konsep ilmu politik dengan salah satu dimensinya adalah “*political education*” . Hal ini sejalan dengan pendapat Coleman (1965 : 21), bahwa “...*civic education positive correlation between education and political cognition and participation*”. *Civic education* mempunyai korelasi positif antara pendidikan dan kesadaran politik juga partisipasi warga negara.

Selain itu, pendidikan kewarganegaraan memiliki muatan *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skills* (keterampilan kewarganegaraan), dan *civic dispositions* (watak kewarganegaraan). Seorang warga negara yang ideal dan demokratis seyogyanya tampil sebagai “*Informed and Reasoned Decision Maker*” atau pengambil keputusan yang cerdas dan bernalar. Untuk itu diperlukan *knowledge* atau pengetahuan dan wawasan serta *beliefs* atau kepercayaan berupa kebajikan warga negara. Saling penetrasi antara ketiga kluster kemampuan tersebut akan menghasilkan tumbuhnya individu warga negara yang berkemampuan, berkeyakinan diri, dan kesediaan mengabdikan diri. Hal inilah yang diperlukan oleh pemilih pemula. *Partisipasi hendaknya jangan terbatas pada pemberian suara, namun juga harus kritis menyuarakan aspirasi dan tanggap terhadap perkembangan politik yang ada* (Branson, 1998: 10). Kecakapan partisipatoris selain ditumbuhkan melalui esensi dari materi Pendidikan Kewarganegaraan juga ditumbuhkan melalui proses pembelajaran yang dilakukan. Seperti metode yang digunakan guru, dimana kecakapan partisipatoris dapat tertanam dari diri siswa apabila siswa memperoleh kesempatan untuk aktif dalam proses belajar mengajar, dapat mengemukakan pendapat secara kritis dan menghargai pendapat orang lain. Bukan metode yang bersifat *textbook* atau *one way methode* dimana guru sebagai sumber belajar. Kelas sebagai laboratorium demokrasi merupakan bentuk mini dari demokrasi di lingkungan bernegara dapat dilaksanakan di kelas, dengan menghilangkan sifat indoktrinasi; Pendekatan pembelajaran yang sesuai ialah yang berorientasi pada berpikir kritis, pemecahan masalah

Oleh karena pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan dalam menumbuhkan kecakapan partisipatoris pemilih pemula dan adanya pelaksanaan Pemilu 2009, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul tesis *“Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Pengembangan Kecakapan Partisipatoris Pemilih Pemula” (Studi deskriptif Pada Siswa SMA Negeri di Bandung).*

B. Identifikasi Masalah

Bertolak dari latar belakang penelitian di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut, “Mengapa Pendidikan Kewarganegaraan berpengaruh terhadap pengembangan kecakapan partisipatoris pemilih pemula?”. Agar rumusan tersebut lebih terperinci, maka diperoleh pertanyaan penelitian sebagai berikut :

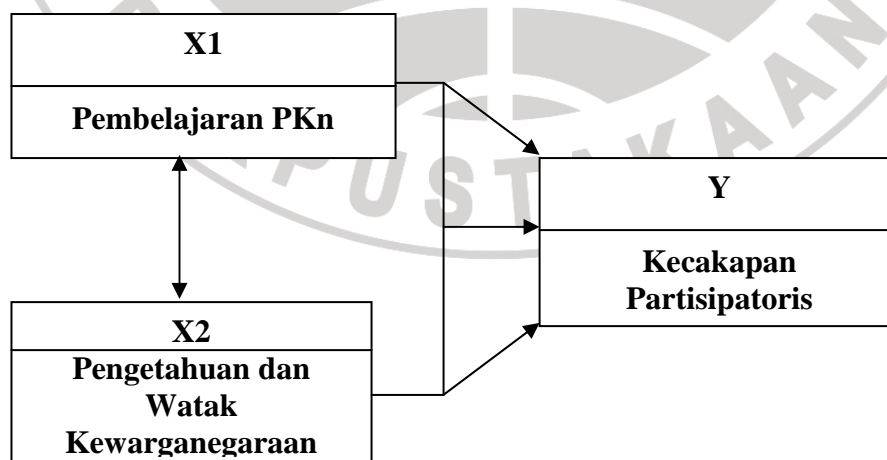
1. Bagaimana pengaruh pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap pengembangan pengetahuan dan watak kewarganegaraan pemilih pemula?
2. Bagaimana pengaruh pengetahuan dan watak kewarganegaraan terhadap pengembangan kecakapan partisipatoris pemilih pemula?
3. Bagaimana pengaruh pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan terhadap pengembangan kecakapan partisipatoris pemilih pemula melalui penanaman pengetahuan dan watak kewarganegaraan?

C. Variabel Penelitian

Titik fokus dari penelitian ini terdiri atas tiga variabel, yaitu :

1. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (X1), yang terdiri dari : Materi, Metode, Media, Sumber dan Evaluasi Pembelajaran PKn
2. Pengetahuan dan Watak Kewarganegaraan (X2), yang terdiri dari *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan) dan *civic dispositions* (watak kewarganegaraan)
3. Kecakapan partisipatoris (Y), yang terdiri atas *interacting* (interaksi), *monitoring* (pengawasan) serta *influencing* (mempengaruhi). Ketiga kecakapan partisipatoris yang digunakan ialah kecakapan partisipatoris pemilih pemula dalam pemilu sebagai dampak langsung dari pembelajaran PKn maupun dampak tidak langsung yaitu Pembelajaran PKn melalui pengembangan pengetahuan dan watak kewarganegaraan.

Koneksitas dari ketiga variabel penelitian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.1 Koneksitas Variabel Penelitian

D. Definisi Operasional

Setiap terminologi memiliki makna yang berbeda dalam konteks dan lapangan studi yang berbeda. Oleh sebab itu, untuk memperjelas konsep dari variabel yang diteliti sehingga tidak mengundang tafsir yang berbeda, maka dirumuskan definisi operasional atas variabel sebagai berikut :

1. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan :

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang ideal merujuk pada pendapat David Kerr (1995 : 5-7) Pendidikan Kewarganegaraan yang bersifat maksimal yang ditandai oleh *thick, exclusive, activist, citizenship education, participative, process led, values based, interactive interpretation, more difficult to achieve and measure in practice*. Maksudnya adalah didefinisikan secara luas, mewadahi berbagai aspirasi dan melibatkan berbagai unsur masyarakat, kombiasi pendekatan formal dan informal, diberi label "*citizenship education*", menitikberatkan pada partisipasi siswa melalui pencarian isi dan proses interaktif didalam maupun diluar kelas, hasilnya lebih sukar dicapai dan diukur karena kompleksnya hasil belajar.

Potensi atau kecakapan yang dimiliki warga negara harus melalui pola pendidikan agar tersampaikan dalam bentuk partisipasi warga negara terutama pada generasi muda sebagai penerus bangsa. Untuk berpartisipasi itulah, maka warga negara membutuhkan seperangkat kecakapan, yaitu kecakapan partisipatoris yang didapat dari Pendidikan Kewarganegaraan , karena muatan Pendidikan Kewarganegaraan yang demokratis mencakup "*...the knowledge, skills and values*" yang relevan dengan hakikat dan praktik demokrasi partisipatif

bagi individu, sekolah dan masyarakat secara luas yang merupakan parameter hasil pendidikan.

2. Kecakapan Partisipatoris

Seperangkat kemampuan yang berhubungan dengan keterlibatan dan peran serta seseorang. Menyangkut hal *interacting, monitoring, dan influencing* seperti : berperan serta aktif, berpikir kritis, dan tanggap terhadap keadaan. Berhubungan pada kemampuan proses-proses politik dan pemerintahan, baik proses formal maupun informal dalam masyarakat. Dalam hal ini kecakapan partisipatoris pemilih pemula yang berkaitan dalam Pemilihan Umum.

3. Pemilih Pemula

Pemilih Pemula adalah pemilih atau mereka yang berusia 17 (tujuh belas tahun) atau sudah pernah menikah bertepatan pada pelaksanaan pemilu. Diluar pensiunan TNI dan Polri yang pertama kali mengikuti pemilu.

Tabel 1.1
Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel	Indikator
Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (X1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Materi Pembelajaran PKn 2. Metode Pembelajaran PKn 3. Media Pembelajaran PKn 4. Sumber Pembelajaran PKn 5. Evaluasi Pembelajaran PKn
Pengetahuan dan Watak Kewarganegaraan (X2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Civic knowledge</i> <ul style="list-style-type: none"> • Pemilu dalam negara demokrasi • Peran warganegara dalam pemilu • Kewajiban warganegara dalam pemilu 2. <i>Civic dispositions</i> <ul style="list-style-type: none"> • Menjadi voters dalam pemilu • Memenuhi tanggungjawab personal kewarganegaraan di dalam pemilu • Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu • Berpartisipasi dalam urusan-urusan pemilu secara efektif dan bijaksana • Mengembangkan berfungsinya demokrasi konstitusional secara sehat
Kecakapan Partisipatoris (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Interacting</i> (interaksi) dalam pemilu) : <ol style="list-style-type: none"> a. Mengkomunikasikan pemilu b. Bekerjasama menyukseskan pemilu c. Tanggap informasi akan pemilu d. Posisinya dalam sebuah konflik 2. <i>Monitoring</i> (pengawasan) dalam pemilu <ol style="list-style-type: none"> a. Mengawasi jalannya pemilu

	<ul style="list-style-type: none"> b. Memantau isu pemilu c. Menganalisis peserta pemilu <p>3. <i>Influencing</i> (mempengaruhi) dalam pemilu</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan suara b. Menyuarakan pendapat dalam pemilu
--	---

E. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan melakukan kajian tentang peran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap pengembangan kecakapan partisipatoris pemilih pemula dalam menyongsong Pemilu 2009. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam pengaruh pembelajaran kewarganegaraan terhadap pengembangan kecakapan partisipatoris pemilih pemula.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam pengaruh pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap penerahuan dan watak kewarganegaraan
3. Mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam pengaruh pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap pengembangan kecakapan partisipatoris pemilih pemula melalui penanaman pengetahuan dan watak kewarganegaraan.

F. Signifikansi dan Manfaat Penelitian

Penelitian akan lebih bermakna apabila memberikan manfaat, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi masyarakat. Dalam segi keilmuan diharapkan penelitian ini nantinya akan dapat :

1. Memberikan gambaran mengenai pengaruh pembelajaran PKn terhadap pengembangan kecakapan partisipatoris pemilih pemula.
2. Menambah ilmu pendidikan khususnya dalam mata pelajaran PKn khususnya mengenai kontribusi pembelajaran Pkn terhadap pengembangan kecakapan partisipatoris pemilih pemula (baik kelebihan ataupun kekurangannya).
3. Menemukan konsep-konsep baru sebagai bahan masukan dalam pembuatan/perumusan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan yang lebih signifikan terhadap tujuan pendidikan nasional.

Secara praktis, Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada :

1. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) : hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan kepada BSNP sebagai pembuat kurikulum untuk melengkapi kekurangan yang terdapat dalam kurikulum PKn terutama yang berkaitan dengan pengembangan kecakapan partisipatoris.

Agar kelak dapat menghasilkan materi PKn yang tepat sasaran dalam mengembangkan kemampuan siswa.

2. Guru : memberikan bahan masukan pada guru PKn dalam menyusun rencana pembelajaran dan metode pembelajaran PKn agar proses dan hasil

pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan. Siswa sebagai pemilih pemula dapat memiliki kecakapan partisipatoris.

3. Kepala Sekolah : dapat memberikan fasilitas yang menunjang kepada guru dan siswa agar dapat melaksanakan pembelajaran PKn dengan baik, sehingga siswa dapat mewujudkan hasil pembelajaran PKn khususnya yang mendukung kecakapan partisipatoris lingkungannya terutama di lingkungan sekolah.
4. Pemerintah : sebagai pembuat kebijakan di tingkat pusat, maka penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan dibidang pendidikan.

G. Kerangka Konseptual

Proses peningkatan kualitas demokrasi di negara kita sedang dilaksanakan secara berkesinambungan. Dimulai dari aspek kehidupan bernegara dimana pemilihan pejabat negara dari tingkat pusat hingga tingkat daerah dilakukan langsung oleh rakyat Indonesia. Kondisi ini memerlukan iklim yang mendukung yang salah satunya ialah partisipasi warga negara. Tanpa partisipasi dari warga negara maka kehidupan yang demokratis hanya utopis belaka yang tak akan pernah terwujud dalam realitas yang sesungguhnya. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa demokrasi bukanlah suatu tujuan namun alat untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan, yaitu menciptakan masyarakat madani (*civil society*) di Indonesia.

Partisipasi merupakan elemen yang sangat penting dalam demokrasi karena warga negara yang arif adalah mereka yang memiliki kesadaran tentang

hak dan kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam politik, taat dan setia pada kebijakan yang ada (Almond&Verba, 1986). Begitu pula siswa yang telah memiliki hak pilih atau yang disebut pemilih pemula. Harus melaksanakan hak dan kewajiban yang melekat padanya. *Voting* merupakan alat yang penting dalam rangka mempengaruhi kebijakan tetapi ia bukanlah merupakan satu-satunya cara. Warga negara perlu menggunakan cara-cara lain, seperti yang dikemukakan oleh Branson (1998:10) : “*Voting certainly is an important means of exerting influence; but it is not the only means. Citizens also need to learn to use such means as petitioning, speaking or testifying before public bodies, joining as-hoc advocay groups, and forming coalitions*”. Selain *voting* cara lain dapat dipergunakan warga negara untuk mempengaruhi jalannya kehidupan politik sebagaimana dikemukakan Branson adalah mengajukan petisi, berpidato atau menunjukkan kebolehan di depan anggota-anggota badan publik, bergabung dengan kelompok-kelompok advokasi dan membentuk koalisi-koalisi. Sebagaimana halnya kecakapan-kecakapan interaksi dan memonitor, kecakapan mempengaruhi dapat dikembangkan secara sistematis. Jika menghendaki warga negara dapat mempengaruhi jalannya kehidupan politik dan kebijakan publik, mereka perlu menambah jam terbang mereka dalam kecakapan-kecakapan partisipatoris tersebut.

Kecakapan partisipatoris dapat dikategorikan melalui proses *interacting, monitoring, and influencing*. Interaksi (*interacting* berkaitan dengan kecakapan – kecakapan warga negara dalam berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang lain. Berinteraksi adalah menjadi tanggap terhadap warga megara lain terutama

dalam proses pemilu. Interaksi berarti bertanya, menjawab, dan berunding dengan santun demikian juga membangun koalisi-koalisi dan mengelola konflik dengan cara yang damai dan jujur. Memonitor sistem politik dan pemerintahan mengisyaratkan pada kemampuan warganegara untuk terlibat dalam proses politik dan pemerintahan. *Monitoring* juga berarti fungsi pengawasan atau *watchdog* warga negara (Budimansyah dan Winataputra, 2007:190).

Pemupukan kecakapan partisipatoris yang jelas-jelas dapat diperoleh siswa sebagai pemilih pemula ialah melalui pendidikan seperti yang dikemukakan oleh John Kennedy (dalam Surbakti : 1992:56) : Ada pepatah lama bahwa perjalanan peradaban adalah suatu perlombaan antara malapetaka dan pendidikan. Dalam demokrasi yang kita miliki ini, kita harus meyakinkan bahwa pendidikan memenangkan perlombaan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendidikan yang bermuatan esensi demokrasi yaitu pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan yang memiliki *core political education*.

Sosialisasi politik yang diperoleh siswa pada dasarnya bukan hanya berasal dari parpol ataupun media massa namun juga di kelas. Oleh karena itu di dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebaiknya guru :

1. *Knowledge* : banyak guru tidak memiliki latar belakang akademik yang diperlukan untuk membantu para siswanya mengembangkan suatu pemahaman yang akurat dan seimbang tentang kehidupan benegara, politik dan pemerintahan.
2. *Skill* : pengajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja bersama secara kooperatif dalam mengidentifikasi dan menganalisis

persoalan-persoalan, mengembangkan usulan pemecahan masalah-masalah kebijakan publik dan keterampilan politik praktis

3. *Attitudes* : menghindari sikap sinisme pada pemerintahan.

(Cogan, 2002:150)

Menurut Djahiri (2002 : 93), guru dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan harus berperan sebagai fasilitator yang membelajarkan siswa (keseluruhan potensi siswa atau potensi fisik, kognitif, afektif dan psikomotornya melalui bahan ajar, sumber, media dan lingkungan ajar bahkan melalui kegiatan evaluasinya. Proses ini akan berjalan mulus apabila semua komponen pengajaran (buku, bahan ajar, media, sumber dan pola evaluasi) serta suasana belajar (*learning climate*) sesuai dengan kemampuan siswa, sarat dengan kebermaknaan (berguna manfaat), demokratis serta mengundang dan mendorong mereka terlibat. Melalui pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan di persekolahan maka siswa sebagai pemilih pemula dapat belajar dan berinteraksi dengan kelompok-kelompok kecil dalam rangka mengumpulkan informasi, bertukar pikiran. Mereka pun belajar menyimak dengan penuh perhatian, mengelola konflik dan konsensus. Murid yang lebih senior mengembangkan kecakapan memonitor dan mempengaruhi kebijakan publik. Menghadiri pertemuan Organisasi Intra Sekolah (OSIS), juga dengar pendapat anggota legislatif (Budimansyah&Winataputra, 2007:190).

Menurut Yahnu Wiguno Sanyoto (dalam <http://pemilihmuda.blogdetik.com/index.php/archives/9#more-9>), *civic education* atau pendidikan kewarganegaraan memiliki beberapa fungsi dalam pemilu, yaitu : pertama *civic*

education berkontribusi untuk memberikan informasi dan wawasan tentang berbagai hal menyangkut cara-cara penyelesaian masalah. Artinya, kita semua yang lebih memahami masalah politik/pemerintahan satu tingkat di atas pemula memiliki kewajiban melakukan pencerdasan dan penguatan *civic education*. Kedua, *civic education* juga dapat dikatakan sebagai sebuah proses karena dalam jangka panjang bertujuan untuk mempersiapkan partisipasi rakyat sekaligus mengubah kepercayaan dan budaya politik yang cenderung tradisional (*parochial*) mengarah pada budaya politik yang subyek partisipan. Atau dengan kata lain civic education harus mampu menanamkan kesadaran dan membekali pengetahuan peran pemilih pemula dalam lingkungan masyarakat yang demokratis serta menghasilkan generasi-generasi muda yang aktif, mandiri, terbuka, jujur dan cerdas (berdaya nalar tinggi). Proses pendidikan dalam *civic education* pun harus disampaikan bukan hanya pada aspek intelektual semata, tetapi juga pada aspek emosional, aspek spiritual, dan ditambah aspek sosial guna memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai dalam menganalisis dan memecahkan masalah social di sekitarnya, termasuk masalah politik/pemerintahan yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan keseharian mereka.

Tanpa adanya *civic education* yang kontinyu mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan (sekolah), kelompok bermain, pekerjaan/profesi atau bahkan media massa maka rakyat khususnya pemilih pemula hanya akan dijadikan komoditas politik, ditipu oleh politisi, indoktrinasi politik, terjebak dalam simbol-simbol politik tanpa mengetahui maknanya dan masih banyak implikasi lainnya dari lemahnya proses *civic education*. Bagi pemilih pemula,

institusi yang secara langsung berkewajiban melaksanakan *civic education* adalah sekolah dari tingkat terendah sampai tingkat tinggi (termasuk Politeknik, Akademi, Institut, Sekolah Tinggi, Perguruan Tinggi). Hal ini dikarenakan sekolah memegang peranan yang sangat strategis dalam membentuk sikap-sikap warga negaranya terutama kaum muda agar memiliki etika politik/pemerintahan yang mapan. Sekolah pulalah yang menanamkan nilai-nilai yang terkait dengan masalah hak dan kewajiban seorang individu yang memiliki sifat sebagai makhluk individu dan makhluk berpolitik (*zoon politicon*), serta integritas politik yang tinggi terhadap bangsa dan negara sebagai sebuah perjalanan menuju masa konsolidasi demokrasi sekaligus penguatan *civic society* sekalipun kecenderungan yang terlihat saat ini adalah proses liberalisasi politik

Proses sosialisasi politik pada pemilih pemula memang harus dilaksanakan secara netral dan kontinu karena sosialisasi politik yang dijalani anak-anak dan remaja lebih dipengaruhi keluarga, berbeda dengan orang dewasa yang lebih terpengaruh oleh media massa. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan yang lebih tepat sasaran agar pemilih pemula tidak bersifat primordial sehingga disinilah peran pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan yang menyiapkan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggungjawabnya sebagai warganegara, dan secara khusus peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran dan belajar dalam proses penyiapan warga negara tersebut.

Di Indonesia mata pelajaran PKn telah ada sejak tahun 1962 dengan nama *Civics*. *Civics* ini berisikan pengalaman belajar yang digali dan dipilih dari

disiplin ilmu sejarah, geografi, ekonomi dan politik serta pidato-pidato presiden. Pada tahun 1968 disebut pendidikan Kewargaan negara yang berisikan sejarah dan konstitusi Indonesia. Pada kurikulum 1975 istilah Pendidikan Kewargaan Negara diubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang berisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan dalam P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Dengan dikeluarkannya UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan adanya Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan disetiap jenjang pendidikan. PPKn berisikan konsep nilai yang berasal dari intisari Pancasila. Kemudian dengan adanya Kurikulum 2004 maka konsep PPKn dirubah menjadi PKn atau Pendidikan Kewarganegaraan yang lebih membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian yang fungsional bagi kehidupan bermasyarakat, berpolitik, dan berpemerintahan, berbangsa dan bernegara, serta bagi kehidupan antarbangsa. Dalam pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, secara imperatif digariskan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”. Karena itu pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjadikan manusia sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab secara filosofis, sosio-politis dan psikopedagogis merupakan

peranan dari pendidikan kewarganegaraan. Secara filosofis, demokrasi sebagai ide, norma, prinsip ; secara sosiologis sebagai sistem sosial; dan secara psikologis sebagai wawasan, sikap. Dan perilaku individu dalam hidup bermasyarakat. Seperti yang tercantum pada Penjelasan Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi : “Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan kebangsaan atau pendidikan karakter. Semua itu menuntut adanya penghayatan kita terhadap Pendidikan Kewarganegaraan sebagai suatu keilmuan, instrumentasi, pendidikan yang utuh dimana memuat nilai-nilai dan cita-cita bangsa. Pada kelanjutannya dapat menumbuhkan *civic intelligence*, *civic participation* serta *civic responsibilities*.

PKn bertujuan agar siswa dapat menguasai kompetensi-kompetensi tertentu yang berdasarkan (Branson dalam Winataputra dan Budimansyah, 2007:19) : *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan) berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui warga negara, *civic skills* (kecakapan kewarganegaraan) adalah kecakapan intelektual dan partisipatoris warganegara yang relevan, dan *civic dispositions* (watak kewarganegaraan) yang mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi penanaman dan pengembangan nilai-nilai demokrasi. PKn seperti ini berbeda dengan PKn sebelumnya yang lebih menekankan pada teoritis. Bahan ajar PKn semakin hari semakin mengadaptasikan terhadap perkembangan kehidupan negara dan masyarakat juga menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai identitas bernegara sehingga siswa dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya Indonesia. Pendidikan yang baik memungkinkan warganegara mengerti, menghargai kesempatan dan tanggungjawabnya sebagai warganegara yang dmokratis. Pendidikan yang bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan dan praktik demokrasi, tetapi juga menghasilkan warga negara yang berpendirian teguh, mandiri, memiliki sikap selalui ingin tahu dan berpandangan jauh ke depan.

Menurut Djahiri (1985 : 6) ; Proses interaksi antara berbagai potensi diri siswa untuk pembinaan, pengembangan dan penyempurnaan potensinya tersebut. Potensi siswa dengan guru, siswa lain, lingkungan, berbagai konsep dan fakta. Berbagai stimulus berencana (*condition stimulus*) dengan berbagai respon terarah (*condition respond*) ke arah melahirkan berbagai perubahan yang diharapkan (*condition consequences*). *National Assesment of Educational Process* (NAEP) (dalam Dasim & Winataputra, 2007 :189) membuat kategori mengenai kecakapan-kecakapan tersebut, yaitu : *identifying and describing; explaining and analyzing; and evaluating, taking, and defending positions on public issues*. Pendidikan kewarganegaraan yang bermutu memberdayakan siswa agar dapat mengidentifikasi, menjelaskan dan menganalisis, evaluasi, memberikan, menentukan posisi pada isu-isu publik. Oleh karena itu, isu-isu kontroversial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus dimasukkan ke dalam bahan ajar sesuai dengan jenjang pendidikannya. Siswa dapat mengetahui isu kontroversial di dalam negaranya yang menumbuhkan sikap kepekaan dan kritis.

Sebagaimana misi pendidikan mengenai demokrasi menurut (Budimansyah&Winataputra, 2007:219) : (1) Memfasilitasi warganegara untuk

mendapatkan berbagai akses dan menggunakan secara cerdas sebagai sumber informasi sehingga memiliki wawasan yang luas dan memadai. (2) Memfasilitasi warganegara untuk dapat melakukan kajian konseptual dan operasional secara cermat dan bertanggungjawab terhadap berbagai cita-cita, instrumentasi, dan praksis demokrasi guna mendapatkan keyakinan dalam mengambil keputusan individual atau kelompok dalam kehidupan sehari-hari dan berargumentasi atas keputusannya itu. (3) Memfasilitasi warga negara untuk memperoleh dan memanfaatkan kesempatan berpartisipasi secara cerdas dan bertanggungjawab dalam praksis kehidupan demokrasi di lingkungannya.

H. Asumsi Penelitian dan Hipotesis Penelitian

1. Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian merupakan teori, evidensi-evidensi dan dapat pula pemikiran peneliti sendiri yang merupakan sesuatu yang dianggap benar dan tidak perlu dipersoalkan lagi atau dibuktikan lagi kebenarannya (Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 2007:52).

Di dalam penelitian ini, asumsi penelitian yang dijadikan titik tolak pemikiran adalah :

- a. Pemilih pemula merupakan sosok pemilih yang sangat potensial dalam pemilihan umum karena jumlahnya yang sangat banyak dan mudah diberikan doktrin politik.
- b. Pemilih pemula harus memiliki kecakapan partisipatoris, bukan hanya sekedar partisipasi karena mereka generasi penerus bangsa.

- c. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kontribusi yang sangat penting bagi pemilih pemula, selain memberikan pengetahuan juga pemilih pemula dapat ditanamkan kecakapan partisipatorisnya karena Pendidikan kewarganegaraan memiliki aspek *civic skill*. Selain itu pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan secara keseluruhan berbasis demokrasi.

2. Hipotesis Penelitian

a. Hipotesis Penelitian

1) Hipotesis Mayor :

Pendidikan Kewarganegaraan berpengaruh signifikan terhadap pengembangan kecakapan partisipatoris pemilih pemula.

2) Hipotesis Minor :

- Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berpengaruh signifikan terhadap pengembangan pengetahuan dan watak kewarganegaraan
- Pengetahuan dan watak kewarganegaraan berpengaruh signifikan terhadap pengembangan kecakapan partisipatoris pemilih pemula
- Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan serta pengetahuan dan watak kewarganegaraan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengembangan kecakapan partisipatoris pemilih pemula.

I. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif memiliki tujuan mengembangkan hubungan

antara dua variabel terukur, dan proses penelitiannya berurut dikembangkan sebelum studi dimulai (Schumacher dan Millan, 2001 : 22). Pendekatan kuantitatif memiliki konsep kunci adanya peubah. Selanjutnya digunakan statistika sebagai bagian dari matematika yang secara khusus membicarakan cara-cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis dan penafsiran data. Tahapan dan tujuan analisisnya dimulai dari statistika deskriptif, statistika inferensial atau statistika induktif. Dilihat dari asumsi mengenai distribusi populasi data yang dianalisis, penelitian ini menggunakan statistik parametrik model distribusi normal. Data kuantitatif yang diperoleh, diolah menggunakan *SPSS (Statistical Package for Social Science)* agar diperoleh informasi statistik tentang keterandalan instrumen, analisis korelasional, analisis regresi, dan analisis jalur.

Metode yang digunakan ialah metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya (Sukardi, 2005:157). Dengan metode ini peneliti memungkinkan melakukan hubungan antarvariabel, menguji hipotesis.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SMA Negeri di Kota Bandung.

b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah siswa yang telah memiliki cukup usia untuk menjadi pemilih pemula yaitu siswa kelas XII SMA Negeri di Bandung. Teknik pengambilan sampel yang digunakan ialah sampel

rumpun (*cluster sample*) . Dimana penelitian mengenai murid-murid sekolah biasanya tidak dapat menggunakan teknik pengambilan sampel secara acak melainkan harus secara rumpun. Yang mendapat peluang sama untuk menjadi sampel buka murid secara individual, melainkan sekolah (jadi murid secara kelompok). Pengambilan sampel ini didasarkan pada SMA Negeri yang dikategorikan elite, sedang dan rendah. Sehingga diperoleh sampel :

Cluster	Populasi	Sampel	Dibulatkan
Cluster 1 : SMAN 2 BANDUNG	450	37,53	38
Cluster 3 : SMAN 6 BANDUNG	228	19,01	20
Cluster 5 : SMAN 18 BANDUNG	425	35,44	36
Jumlah	1103	91,98	94

Melalui rumus sampel total yang ditarik:

$$\begin{aligned}
 N_t &= \frac{N}{1 + N(e)^2} \\
 &= \frac{1103}{1 + 1103(0,1)^2} \\
 &= \frac{1103}{1 + 11,03} \\
 &= 91,68 \text{ dibulatkan menjadi } 92
 \end{aligned}$$

Dimana :

N = populasi

N_t = ukuran sampel total yang ditarik

E = nilai kritis (toleran) sebesar 10 %

(Sugiyono, 1992 : 60)

Untuk menghitung jumlah masing-masing sampel, digunakan rumus :

$$n = \frac{N1 \times nt}{N}$$

Dimana :

N = populasi

nt = ukuran sampel yang ditarik

N1 = jumlah populasi masing-masing lokasi

(Sugiyono, 1992 : 60)

Selain itu guru Pendidikan Kewarganegaran dari masing-masing sekolah untuk menunjang informasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Angket

Angket atau Questioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang disusun dan disebarluaskan untuk memperoleh informasi dari responden sebagai alat pengumpulan data. Hal ini sejalan dengan pendapat Sukardi (2005:76) *di dalam angket terdapat beberapa macam pertanyaan yang berhubungan erat dengan masalah penelitian yang hendak dipecahkan, disusun dan disebarkan ke responden untuk memperoleh informasi di lapangan.* Untuk mengukur variabel

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menggunakan angket skala *SSHA* (*Survey of Study Habits and Attitudes*) dari Brown dan Holtzman yang telah disesuaikan. Pola skala *SSHA* Brown dan Holtzman ini terdiri dari lima option, yaitu : (1) S = Selalu, (2) SR = Sering, (3) J= Jarang dan (4) TP = tidak pernah. Jawaban yang tepat diberi bobot empat. Skala ini mempunyai keunggulan dalam mengukur kebiasaan seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan bukan seharusnya menjawab soal berdasarkan pengetahuannya.

Variabel pengetahuan kewarganegaraan menggunakan instrumen tes berbentuk pilihan ganda, dimana hanya ada satu jawaban yang benar. Jawaban yang benar diberi skor 1 dan yang salah 0.

Variabel sikap kewarganegaraan Pemilih Pemula menggunakan instrumen skala sikap pola Likert yang telah disesuaikan. Mueller (1996:11) menjelaskan bahwa mengukur sikap seseorang adalah mencoba untuk menempatkan posisinya pada suatu kontinum afektif berkisar dari “sangat positif” hingga “ke sangat negatif” terhadap sesuatu objek sikap. Teknik dalam menggunakan skala ini bagi jawaban yang dianggap tepat jika mengarah ke kutub positif adalah SS (Sangat Setuju), S (Setuju), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju) memperoleh skor 5, 4, 3, 2, 1.

Variabel kecakapan partisipatoris diukur dengan skala kemampuan partisipasi umum yang terdiri dari empat jenis option yaitu (1) Tidak Baik, (2) Kurang Baik, (3) Baik, dan (4) Sangat Baik. Dengan skor 1,2,3, dan 4.

Sebelum menggunakan instrumen sebagai alat pengumpul data, terlebih dahulu diuji kelayakan dengan menggunakan :

- 1) Uji validitas menggunakan rumus korelasi *Pearson product moment* (uji r) dan *Spearman Brown* (Uji t).
- 2) Uji realibilitas menggunakan rumus Alpha.
- 3) Uji daya beda
- 4) Uji tingkat kesukaran soal

b. Wawancara

Wawancara dapat digunakan sebagai penopang atau pelengkap metode lain, tindak lanjut dalam menghadapi hasil yang tak terduga/ terharapkan, memvalidasikan metode-metode lain, menyelami lebih dalam motivasi responden serta alasan-alasan responden memberikan jawaban dengan cara tertentu (Kerlinger, 2007:769).

c. Studi dokumentasi

Dalam studi dokumentasi, penulis mengkaji isi, menganalisa dengan dukungan kepustakaan yang ada sebagai salah satu sumber data penelitian kuantitatif

4. Pengolahan Data

Langkah-langkah prosedur pengolahan data antara lain sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data dan verifikasi data, melalui cara pengecekan atas jawaban responden
- b. Pemberian skor terhadap setiap jawaban responden untuk setiap item

- c. Tabulasi data menurut frekuensi distribusi skor
- d. Menghitung ukuran statistik menurut karakteristik variabel penelitian , pengujian asumsi, SPSS untuk pengolahan data seperti rata-rata, simpangan baku, analisis regresi, koefisien korelasi, serta koefisien jalur.
- e. Analisis data yang telah dihitung dengan cara mengelompokkannya sesuai dengan permasalahan yang diajukan, sehingga dapat mengarah pada sebuah kesimpulan
- f. Penyajian data dengan cara mendeskripsikan data yang telah dianalisis
- g. Pengujian hipotesa dengan menggunakan perhitungan statistik yang relevan
- h. Penafsiran hasil analisis data yang telah diolah, dianalisis serta disajikan untuk kemudian dikaitkan dengan hipotesa yang telah diperoleh
- i. Penarikan kesimpulan berdasarkan pendapat para ahli, teori-teori serta data pengalaman secara empirik

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini ditempuh beberapa teknik analisis data. Pertama analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran atau potret lebih jelas tentang variabel-variabel penelitian yang meliputi pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku siswa. Kedua, analisis induktif, analisis ini dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan dengan memanfaatkan teknik statistik,

sebagai berikut :

a. Analisis dengan Metode Korelasi Sederhana dan Ganda

Analisis korelasi sederhana dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (X1) dengan kecakapan partisipatoris pemilih pemula (Y) dan variabel pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (X1) dengan pengetahuan dan watak kewarganegaraan (X2). Analisis korelasi sederhana menggunakan *Pearson Product Moment*.

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

dimana:

r_{xy} = Koefisien korelasi antara variable X dengan variable Y

X = Variabel bebas

Y = Variabel terikat

N = Jumlah sampel

Korelasi PPM dilambangkan (r) dengan ketentuan nilai r tidak lebih dari harga $(-1 \leq r \leq 1)$. Apabila nilai $r = -1$ artinya korelasinya negatif sempurna; $r = 0$ artinya tidak ada korelasi; dan $r = 1$ artinya korelasinya sangat kuat. Berikut ini interpretasi nilai r selengkapnya:

Tabel 1.3
Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,80 – 1,000	Sangat kuat
0,60 – 0,799	Kuat
0,40 – 0,599	Cukup kuat
0,20 – 0,399	Rendah
0,00 – 0,199	Sangat rendah

Kemudian untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel X terhadap Y serta X1 terhadap X2 dapat ditentukan dengan rumus koefisien determinan sebagai berikut:

$$KP = r^2 \times 100 \%$$

Dimana:

KP = Nilai koefisien determinan

r = Nilai koefisien korelasi

Adapun untuk menguji signifikansi koefisien korelasi digunakan rumus

Uji t, yaitu

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Dimana:

t = nilai t hitung

r = nilai koefisien korelasi

n = jumlah sampel

Analisis korelasi ganda digunakan untuk mengukur hubungan variabel *pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (X₁)* dengan variabel *pengetahuan dan watak kewarganegaraan (X₂)* dengan variabel *kecakapan partisipatoris (Y)*.

Analisis korelasi ganda menggunakan rumus:

$$R_{X_1X_2Y} = \sqrt{\frac{r^2_{X_1Y} + r^2_{X_2Y} - 2(r_{X_1Y})(r_{X_2Y})(r_{X_1X_2})}{1 - r^2_{X_1X_2}}}$$

$$KP = r^2 \times 100 \%$$

Selanjutnya untuk mengetahui signifikansi korelasi ganda (X1 dan X2 terhadap Y) dicari dulu F_{hitung} kemudian dibandingkan dengan F_{tabel} . Perhitungan F_{hitung} digunakan rumus:

$$F_{hitung} = \frac{\frac{R^2}{k}}{\frac{(1 - R^2)}{n - k - 1}}$$

Dimana :

R = Nilai koefisien korelasi ganda

k = Jumlah variabel bebas

n = Jumlah sampel

F_{hitung} = Nilai F yang dihitung

Kaidah pengujian signifikansinya adalah jika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$, maka H_0 ditolak artinya signifikan dan jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka H_0 diterima artinya tidak signifikan.

b. Analisis dengan Metode Regresi Ganda

Analisis regresi dilakukan untuk memberikan pembuktian bahwa variabel pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (X1) dengan pengetahuan dan watak kewarganegaraan (X2) berpengaruh terhadap variabel kecakapan partisipatoris pemilih pemula (Y). Dalam bagian ini menggunakan regresi linier ganda.

1) Persamaan dasar untuk regresi linear ganda ialah:

$$Y' = a + b_1X_1 + b_2X_2 \text{ (Kerlinger, 2002:938)}$$

Dimana:

Y' = Skor variabel terikat kecakapan partisipatoris pemilih pemula

a = Nilai konstanta intersepsi

b_1b_2 = Nilai Koefisien regresi

X_1 = Variabel bebas 1 (Pembelajaran PKn)

X_2 = Variabel bebas 2 (Kompetensi Kewarganegaraan)

$$b_1 = \frac{(\sum x_2^2) \cdot (\sum x_1 y) - (\sum x_1 x_2) \cdot (\sum x_2 y)}{(\sum x_1^2) \cdot (\sum x_2^2) - (\sum x_1 x_2)^2} \quad b_2 = \frac{(\sum x_1^2) \cdot (\sum x_2 y) - (\sum x_1 x_2) \cdot (\sum x_1 y)}{(\sum x_1^2) \cdot (\sum x_2^2) - (\sum x_1 x_2)^2}$$

$$a = \frac{\sum Y}{n} - b_1 \left(\frac{\sum X_1}{n} \right) - b_2 \left(\frac{\sum X_2}{n} \right)$$

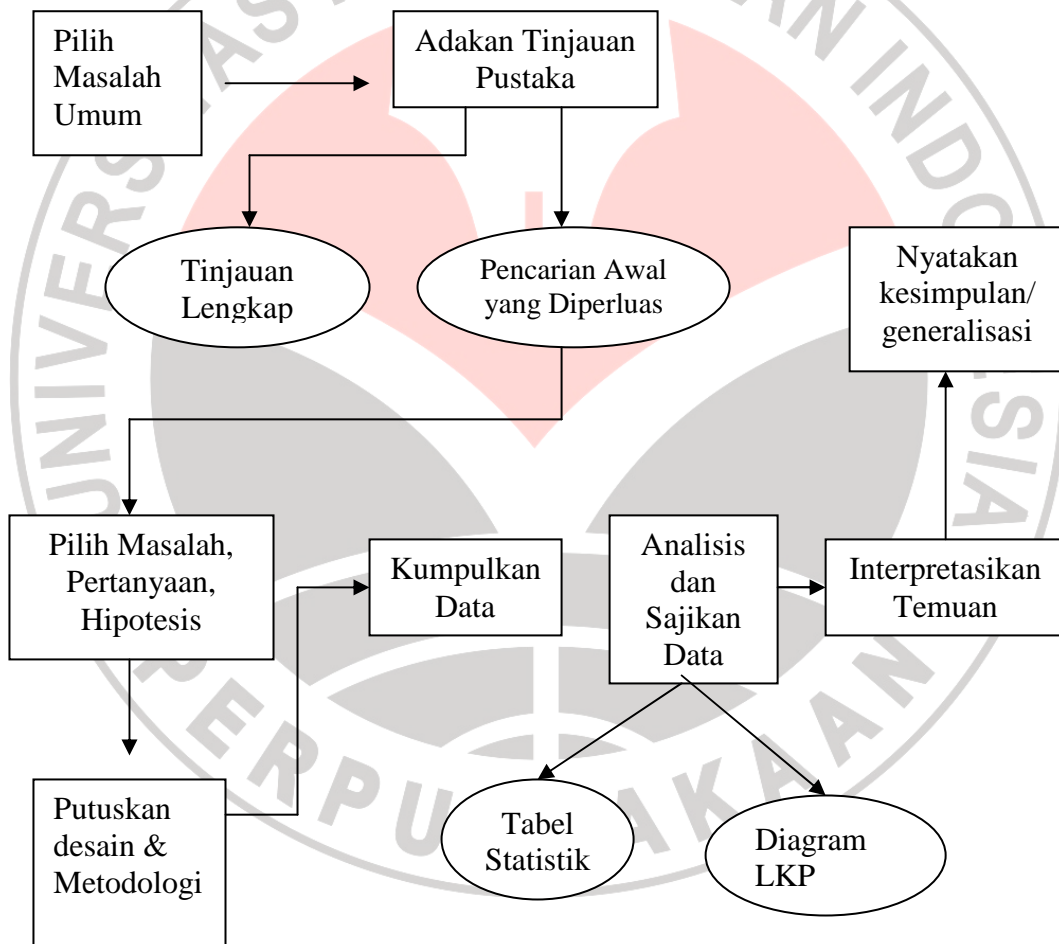
c. Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Analisis jalur merupakan salah satu bentuk terapan dari analisis multi regresi (Kerlinger, 2002:90). Pada analisis ini, digunakan diagram jalur untuk membantu konseptualisasi masalah dan menguji hipotesis kompleks. Sehingga dapat dihitung pengaruh langsung maupun tidak langsung dari variabel-variabel bebas terhadap suatu variabel terikat. Pengaruh tersebut tercermin dalam apa yang disebut dengan koefisien jalur yang sesungguhnya merupakan koefisien regresi yang dibakukan.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian yaitu SMAN 2 Bandung : Jalan Cihampelas No.173 Bandung; SMAN 6 Bandung : Jalan Pasirkaliki no.51 Bandung; serta SMAN 18 Bandung : Jl. Madesa no. 18 Bandung. serta pelaksanaan ujicoba di SMAN 13 Bandung : Jalan Raya Cibeureum No.52 Bandung.

6. Proses Penelitian



Mc.Millan and Schumacher (2000:21)